

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara dapat dilihat atau diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan atau penurunan ukuran ekonomi di setiap negara antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya atau periode saat ini dan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam skala dan pertumbuhan (Nguyen, 2020). Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti terdapat kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

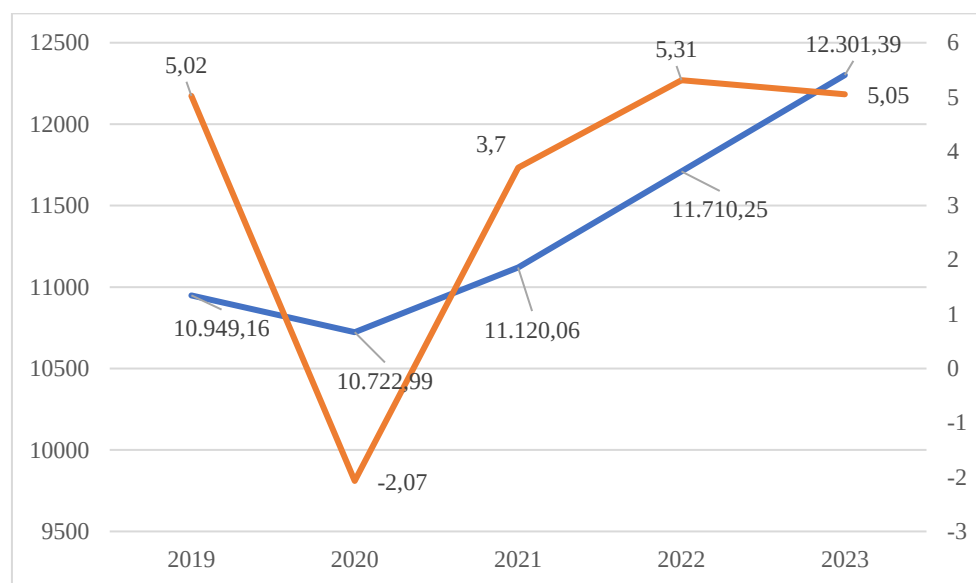
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah hasil total output pasar dari semua barang jadi dan jasa yang telah diproduksi dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu (Mankiw, 2018). PDB menjadi salah satu indikator kunci dalam mengukur kondisi perkembangan ekonomi suatu negara yang lebih baik secara terus menerus selama periode tertentu. Sebuah negara dikatakan mengalami peningkatan PDB ketika dapat memproduksi barang dan jasa yang meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, maka meningkatkan PDB negara tersebut.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang

dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan besaran yang diukur dari kenaikan pendapatan nasional pada periode tertentu, dimana nilai dari pendapatan nasional tersebut dijadikan sebagai tolak ukur aktivitas perekonomian negara dalam menghasilkan tambahan pendapatan pada periode tertentu. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Berikut merupakan gambaran PDB dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia selama tahun 2019 - 2023 tersaji dalam gambar 1.1 dibawah ini:



Sumber : *Worldbank*, (diolah)

**Gambar 1.1 Produk Domestik Bruto & Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2019-2023
(Triliun Rupiah & Persen)**

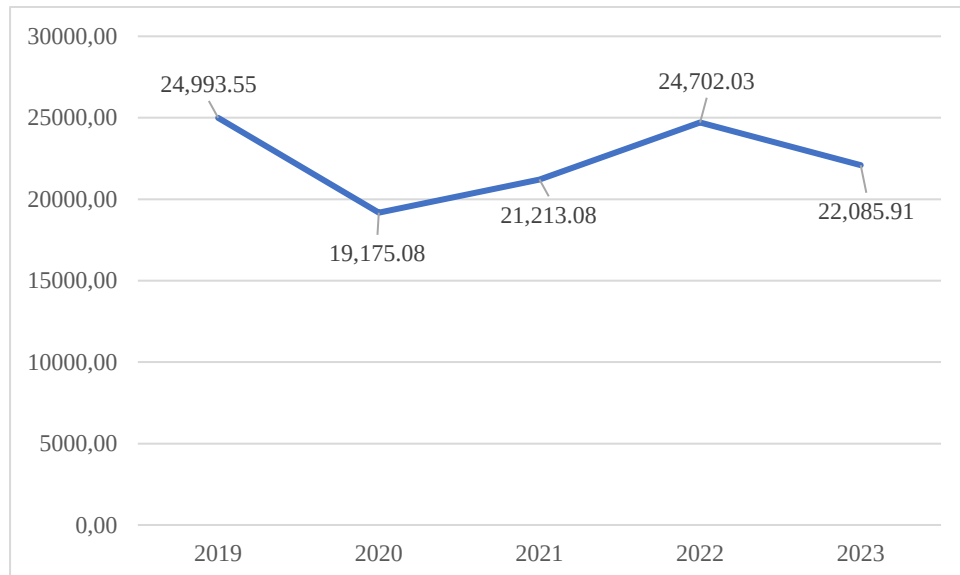
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pada tahun 2019, PDB tercatat sebesar Rp 10.949,16 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Nilai ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil sebelum terjadinya krisis global akibat pandemi. Namun, pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan PDB menjadi Rp 10.722,99 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07%. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. PDB meningkat menjadi Rp 11.120,06 triliun dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7%, yang didorong oleh mulai pulihnya konsumsi masyarakat, pelonggaran kebijakan pembatasan sosial, serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara masif yang meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Pemulihan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana PDB kembali naik menjadi Rp 11.710,25 triliun dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%. Kenaikan ini juga ditopang oleh meningkatnya harga komoditas global, seperti batu bara dan minyak sawit mentah. Pada tahun 2023, PDB Indonesia mencatatkan pertumbuhan lebih lanjut menjadi Rp 12.301,39 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%, mencerminkan penguatan daya beli masyarakat, meningkatnya investasi, serta keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, data PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun sempat

mengalami tekanan akibat krisis global, ekonomi Indonesia memiliki tingkat ketahanan (resiliensi) yang cukup kuat.

Pertumbuhan PDB akan berkembang salah satunya dengan meningkatkan penanaman modal (investasi). Peningkatan penanaman modal akan berdampak pada proses produksi yang semakin giat sehingga meningkatkan PDB suatu negara, kemudian akan mempengaruhi meningkatnya konsumsi rumah tangga, dengan demikian ketika investasi meningkat maka PDB juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat pembangunan yang dilaksanakan di suatu negara. Sumber pembiayaan pembangunan tersebut dapat berasal dari dalam negeri serta luar negeri. Sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri salah satunya adalah dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI).

Menurut Jhingan (2004), *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta asing di negara lain. Investasi jenis ini memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan investasi tidak langsung karena melibatkan pertukaran keterampilan, keahlian manajerial, serta transfer teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan output nasional negara penerima investasi. *Foreign Direct Investment* (Penanaman modal asing) merupakan modal yang ditanam dalam bentuk harta yang berwujud yang meliputi pembuatan pabrik, penyediaan barang modal dengan berbagai jenis, pembelian properti guna kebutuhan produksi, pengeluaran untuk berbagai macam alat inventaris, dan lainnya. *Foreign Direct Investment* (FDI) terjadi saat suatu perusahaan yang ada di satu negara melakukan investasi selama beberapa waktu di suatu perusahaan yang ada di negara lain.

Berikut merupakan gambaran *Foreign Direct Investment* Indonesia selama tahun 2019 - 2023 tersaji dalam sebuah Gambar 1.2 dibawah ini:



Sumber : *Worldbank*, (diolah)

Gambar 1.2 *Foreign Direct Investment* Indonesia Tahun 2019-2023
(Juta US\$)

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa *Foreign Direct Investment* Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, nilai FDI tercatat sebesar 24.993,55 juta USD. Namun, pada tahun berikutnya terjadi penurunan drastis menjadi 19.175,08 juta USD. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ketidakpastian geopolitik, serta perlambatan ekonomi global yang berdampak pada kehati-hatian investor asing dalam menanamkan modalnya. Memasuki tahun 2021, FDI mengalami peningkatan menjadi 21.213,08 juta USD. Pada tahun 2022, FDI kembali melonjak cukup tajam menjadi 24.702,03 juta USD. Kenaikan ini didorong

oleh membaiknya kondisi ekonomi global pasca-pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2023, FDI kembali mengalami penurunan menjadi 22.085,91 juta USD.

Hampir setiap negara di dunia menghadapi tantangan yang disebabkan oleh arus globalisasi. Faktor pendorong utama arus ini yang akan menimbulkan interdependensi aktivitas ekonomi adalah kemajuan dalam sistem transportasi dan telekomunikasi. Bidang perdagangan dan keuangan akan menjadi bagian dari sistem perekonomian terbuka. Untuk memenuhi kebutuhan dan upaya pertumbuhan ekonomi negara, keterbukaan perdagangan dianggap penting.

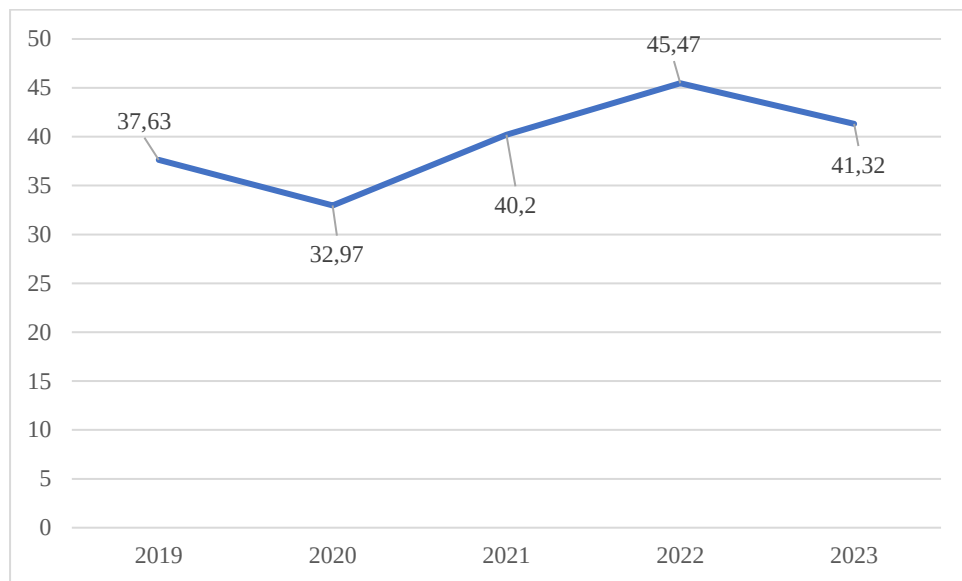
Di era pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung menyebabkan berbagai negara memiliki sistem perekonomian terbuka. Pada era ini, setiap negara membuka diri terhadap perdagangan internasional termasuk Indonesia. Selain itu, persaingan ekonomi semakin meningkat pada setiap negara. Integrasi antar negara yang tercipta menyebabkan batas-batas antar negara semakin mengecil. Akibatnya, perekonomian domestik dan perekonomian internasional menjadi semakin terkoneksi, sehingga setiap negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melalui aktivitas perdagangan internasional. Keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu negara (Tahir & Azid, 2015).

Menurut Levchenko (2008) mendefinisikan *Trade Openness* sebagai rasio jumlah ekspor dan impor terhadap PDB. Dalam kajian IMF, keterbukaan perdagangan dikaitkan dengan volatilitas output, menunjukkan bahwa sektor yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional cenderung lebih volatil. *Trade Openness* memberikan peluang bagi negara yang memiliki sumber daya berlimpah

sebagai faktor produksi untuk mengekspor produk dan mengimpor produk yang memiliki faktor produksi yang langka atau tidak terjangkau bila diproduksi di dalam negeri.

Berikut merupakan gambaran *Trade Openness* Indonesia selama tahun 2019

- 2023 tersaji dalam sebuah Gambar 1.3 dibawah ini:



Sumber : *Worldbank*, (diolah)

Gambar 1.3 *Trade Openness* Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan. *Trade Openness* pada tahun 2019 sebesar 37,6 persen. Terjadi fluktuasi penurunan pada tahun 2020 sebesar 32, 9 persen. Penurunan ini terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Penurunan keterbukaan perdagangan tidak hanya membatasi akses ke pasar internasional tetapi juga berdampak negatif pada aliran investasi asing dan pertumbuhan sektor-sektor penting dalam perekonomian. Pada tahun 2021 terjadi pemulihan dan meningkat sebesar 40,2 persen. Peningkatan ini mencerminkan langkah positif menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pemerintah berkontribusi untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung keterbukaan dan integrasi dalam ekonomi global agar pemulihan pasca pandemi dapat cepat selesai. Sama halnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 45,4 persen. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan 41,3 persen dikarenakan adanya krisis global dan domestik yang seperti ketidakpastian ekonomi global, inflasi, dan masalah rantai pasokan dapat mempengaruhi *trade openness*. Selain itu, kebijakan domestik yang kurang mendukung atau adanya hambatan non-tarif.

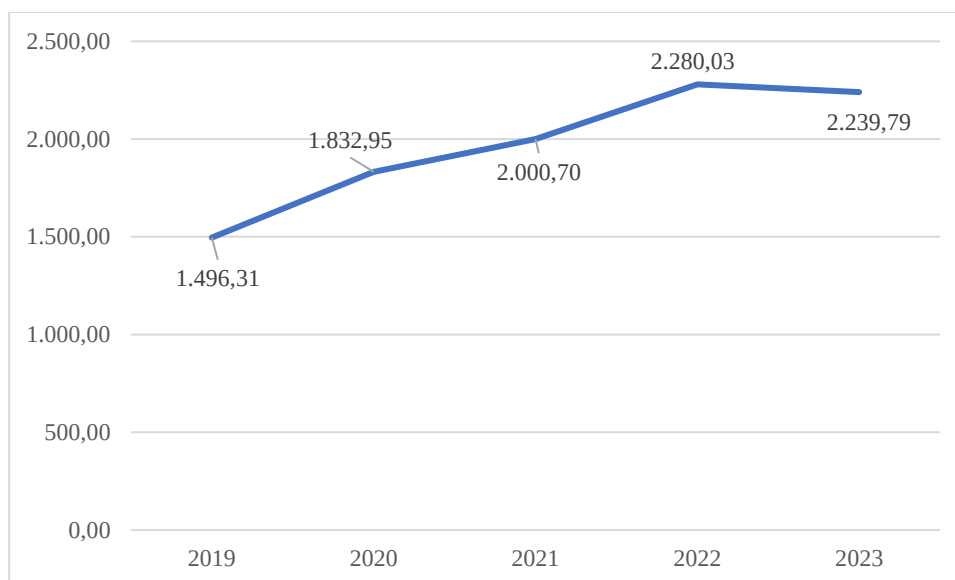
Konsep keterbukaan menunjukkan manfaat ekonomi dari perdagangan internasional, transaksi modal internasional, serta pertukaran pengetahuan dan informasi internasional. Dalam jangka panjang, keterbukaan perdagangan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses ke barang dan jasa, terciptanya efisiensi dalam alokasi sumber daya dan meningkatkan faktor produktivitas total melalui penyebaran teknologi dan penyebaran pengetahuan (Keho, 2017).

Menurut Oyeleke (2014) mengatakan bahwa keterbukaan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah anggaran maupun belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dan mensejahterakan masyarakatnya, pengeluaran pemerintah terdiri dari barang modal, barang konsumsi dan atas jasa-jasa (Sukirno, 2010). Secara umum pengeluaran pemerintah diharapkan memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu negara. Karena seperti yang dibahas di atas bahwa pengeluaran pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan

permasalahan di suatu negara, telah menjadi konsekuensi pemerintah dalam konsep *welfare state* bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga ketika ada kebutuhan baik untuk kegiatan pemerintahan maupun pembangunan pemerintah harus sudah *stand by* untuk memanfaatkan sumber daya finansial yang dimilikinya (Ihsan Suciawan, 2021).

Kemudian berdasarkan penelitian dari Nowbutsing (2014) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong produksi dengan meningkatkan subsidi kepada produsen. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap perekonomian yang akan memberikan manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berikut merupakan gambaran Pengeluaran Pemerintah Indonesia selama tahun 2019 - 2023 tersaji dalam sebuah Gambar 1.4 dibawah ini:



Sumber : *Badan Pusat Statistik*, diolah

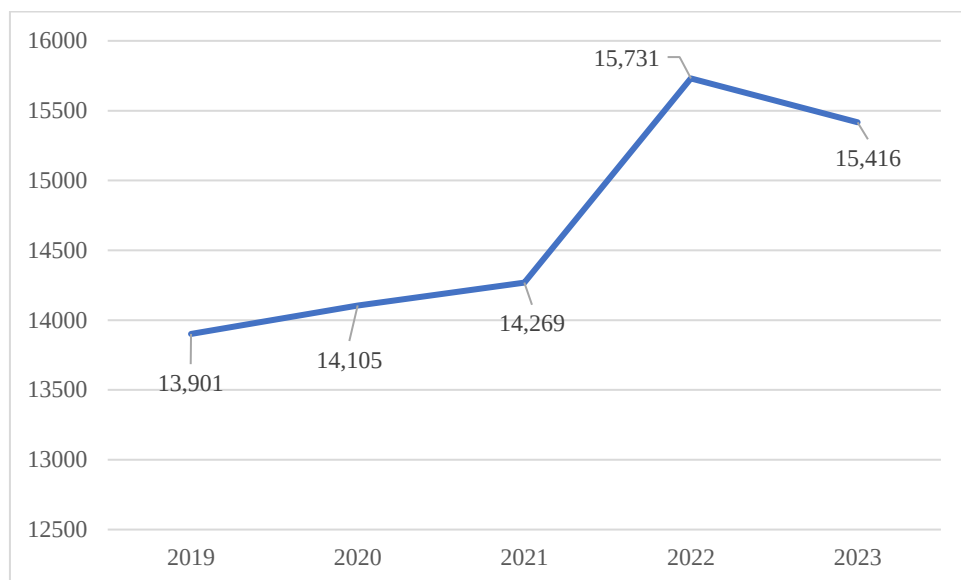
Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2019-2023
(Triliun Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 belanja pemerintah senilai 1.496,31 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2020 peningkatan sebesar 1.832,95 triliun rupiah. Anggaran pemerintah dipakai untuk penanggulangan pandemi COVID-19, baik dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut kedalam belanja kesehatan. Kemudian pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Perlindungan Sosial yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Subsidi Upah. Kemudian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi Bantuan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), dan stimulus pajak. Kemudian pada tahun 2021 peningkatan sebesar 2.000,70 triliun rupiah untuk pemulihan Pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 sebesar 2.280,03 miliar rupiah. Kemudian tahun 2023 peningkatan sebesar 2.239,79 triliun rupiah. Pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 dipengaruhi oleh sejumlah fenomena global dan novelty domestik. Pandemi COVID-19 masih berpengaruh dalam pemulihan ekonomi, sementara fenomena global seperti krisis energi dan ketegangan geopolitik mempengaruhi kebijakan pengeluaran pemerintah.

Adapun indikator krusial dalam analisis perekonomian Indonesia yakni Nilai Tukar. Nilai Tukar berperan selaku alat penukaran jasa maupun barang secara lintas negara, dimana menjadikan manfaatnya nilai tukar sangat esensial pada perdagangan impor ekspor ataupun secara internasional.

Nilai tukar secara umum adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain. Menurut Mankiw (2018) menyatakan bahwa valuta asing atau sering disebut kurs (*exchange rate*) adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Kurs sering juga disebut dengan valas, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.

Berikut merupakan gambaran Nilai Tukar Indonesia selama tahun 2019 - 2023 tersaji dalam sebuah Gambar 1.5 dibawah ini:



Sumber : *Kementrian Perdagangan*, (diolah)

Gambar 1.5 Nilai Tukar Indonesia Tahun 2019-2023 (IDR/USD)

Berdasarkan gambar 1.5 dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2019, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp13.901 per USD, mencerminkan kestabilan ekonomi nasional serta arus modal asing yang masih cukup positif. Namun, pada tahun 2020, nilai tukar mengalami pelemahan menjadi Rp14.105 per USD, yang

kemudian berlanjut ke angka Rp14.269 per USD pada tahun 2021. Pelemahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memicu ketidakpastian global, penurunan aktivitas ekonomi, serta aliran modal keluar dari negara berkembang menuju aset *safe haven* seperti dolar AS. Pelemahan rupiah mencapai titik tertinggi pada tahun 2022, di mana nilai tukar tercatat sebesar Rp15.731 per USD. Melemahnya nilai tukar pada tahun ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga acuan yang agresif oleh *Federal Reserve* (bank sentral Amerika Serikat) dalam upaya menekan inflasi tinggi di negara tersebut. Selain itu, ketegangan geopolitik global seperti perang antara Rusia dan Ukraina turut memperbesar ketidakpastian pasar keuangan dunia. Pada tahun 2023, rupiah mengalami sedikit penguatan dengan nilai tukar berada di angka Rp15.416 per USD. Penguatan ini didorong oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain kebijakan stabilisasi nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui intervensi pasar valas, surplus neraca perdagangan yang cukup besar akibat peningkatan ekspor komoditas, serta masuknya kembali arus modal asing ke pasar keuangan domestik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator utama kinerja ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi ekonomi, arus masuk investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dan keterbukaan perdagangan (*Trade Openness*) menjadi elemen penting yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta transfer teknologi. Di sisi lain, peran aktif pemerintah melalui pengeluaran fiskal menjadi instrumen

penting untuk merangsang pertumbuhan. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memengaruhi daya saing ekspor, biaya impor, dan stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana pengaruh *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia, guna memberikan gambaran yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, Dan Nilai Tukar Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Tahun 2002-2023”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2002-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2002-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar secara parsial terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2002-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar secara Bersama-sama terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2002-2023

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tambahan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya .

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan Masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di negara Indonesia. Penelitian menggunakan data sekunder yaitu data Produk Domestik Bruto, *Foreign Direct Investment*, *Trade Openness*, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Tukar melalui *website* resmi *World Bank*, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Perdagangan RI.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober 2024. Berikut merupakan jadwal penelitian digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

[illegible]